

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengujian hipotesis. Penulisan bab II ini akan disajikan sebagai berikut, yang pertama yaitu tinjauan pustaka untuk menggambarkan konsep dari variabel yang diteliti, yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Selanjutnya membahas tentang kerangka hipotesis yang menjelaskan tentang model variabel, lalu diikuti dengan hipotesis penelitian untuk diuji kebenarannya.

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

2.1.1.1 Pengertian Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang memerlukan pertimbangan yang cermat karena merupakan proksi dari kemiskinan relatif yang diukur dengan proporsi distribusi pendapatan daerah. Ketimpangan pendapatan minimal jika setiap orang di suatu negara atau wilayah memperoleh keuntungan yang sama dari pembangunan ekonomi, baik dalam hal pendapatan pribadi maupun kepemilikan alat produksi (Astuti & Hukom, 2023). Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Per.25/MEN/IX/2009 tentang tingkat pemukiman transmigrasi, indeks gini merupakan pengukuran ketidakmerataan pendapatan yang diperoleh masyarakat dan didasarkan pada 10 kelas pendapatan.

Astuti & Hukom (2023) mendefinisikan ketimpangan pendapatan sebagai sejauh mana individu dalam suatu komunitas memiliki tingkat akses yang berbeda, atau partisipasi dalam, kelompok pendapatan nasional. Karena orang kaya memiliki kecenderungan yang lebih kuat untuk menabung daripada orang miskin, distribusi pendapatan yang lebih tidak merata mengarah pada tingkat tabungan agregat yang lebih tinggi, yang pada gilirannya menghasilkan lebih banyak investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Ketimpangan pendapatan antara dan di dalam berbagai pekerjaan/profesi di Pakistan dengan menggunakan Survei Pendapatan Rumah Tangga (*HIES*) 1992-1993. Hasilnya menunjukkan bahwa ketimpangan yang signifikan diantara berbagai pekerjaan/profesi ditemukan diantara para pekerja terampil dan tingkat ketimpangan terendah ditemukan diantara para pekerja profesional (Anam, 2015).

2.1.1.2 Teori Ketimpangan Antar Daerah

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Hartini, 2017).

Menurut Kuznets seorang ekonom klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara miskin pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Namun bila negara-negara miskin tersebut sudah semakin maju, maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun (*an inverse U shaped patern*). Beberapa ekonom pembangunan tetap berpendapat bahwa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang dikemukakan Kuznets tidak dapat dihindari (Kuncoro, 2006).

Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

2.1.2 World Bank

(*World Bank*, 2016) menyebut ketimpangan pendapatan sebagai konsep yang lebih luas daripada kemiskinan, ketimpangan didefinisikan atas seluruh populasi, tidak hanya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan pendapatan terjadi ketika pendapatan yang dihasilkan masyarakat dari golongan yang berbeda memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Ketimpangan pendapatan yang bernilai tinggi mengindikasikan tidak meratanya distribusi pendapatan atau dapat diartikan pendapatan golongan kaya tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan golongan miskin.

Berdasarkan kriteria *World Bank* ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan dengan total pendapatan penduduk. Kriteria ini membagi pendapatan (income) suatu masyarakat diurutkan dari paling rendah ke paling tinggi, yang dibagi dalam 3 katagori yaitu:

1. Jumlah proporsi yang diterima oleh 40% penduduk lapisan rendah.
2. Jumlah proporsi yang yang diterima 40% penduduk lapisan sedang.
3. Jumlah proporsi yang diterima 20% penduduk lapisan tinggi.

Katagori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

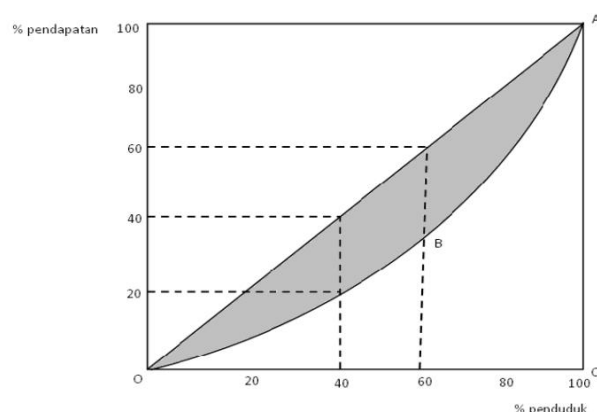
1. jika proporsi jumlah pendapatan dari masyarakat yang masuk katagori 40 % terhadap pendapatan penduduk kurang dari 12 % maka distribusi pendapatan dikatagorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan tinggi.
2. Jika proporsi pendapatan penduduk yang masuk katagori 40 % terendah terhadap pendapatan seluruh masyarakat antara 12 ± 17 %, maka distribusi pendapatan dikatagorikan sebagai memiliki ketimpangan sedang.
3. Jika proporsi pendapatan penduduk yang masuk katagori 40 % terendah terhadap pendapatan seluruh masyarakat lebih besar dari 17 % maka distribusi pendapatan digolongkan rendah.

Pada tahun 1990, sebesar 20 persen penduduk terkaya Indonesia (kuintil 5) menguasai 39 persen total pengeluaran seluruh penduduk. Pada tahun 2010, naik menjadi 44 persen atau sebesar 44 persen total pengeluaran berasal dari 20 persen orang terkaya di Indonesia. Meskipun demikian, posisi Indonesia relatif cukup baik

bila dibandingkan dengan negara-negara yang berada dalam kelompok Lower Middle Income. Dengan kuadran kartesius, Indonesia berada pada kelompok negara dengan kriteria GNI per kapita tinggi dan ketimpangan yang rendah (Wibowo, 2017).

2.1.3 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz merupakan sebuah kurva perbandingan distribusi variabel (seperti pendapatan) dengan distribusi seragam yang menggambarkan persentase kumulatif penduduk. Makin dekat kurva dengan garis diagonal yang merupakan garis pemerataan dalam distribusi pendapatan, berarti nilai rasio gini semakin kecil, sebaliknya semakin kurva menjauhi garis diagonal berarti nilai rasio gini semakin besar (BPS Indonesia, 2022). Kurva Lorenz secara umum sering digunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama periode tertentu, misalnya, satu tahun (Tiara, 2016).



Sumber: (Tiara, 2016)

Gambar 2.1 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz digambarkan pada sebuah bidang persegi/bujur sangkar dengan bantuan garis diagonalnya. Garis horizontal menunjukkan persentase penduduk penerima pendapatan, sedangkan garis vertikal adalah persentase pendapatan. Semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya, berarti ketimpangan semakin rendah dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi diagonal berarti ketimpangan yang terjadi semakin tinggi (Tiara, 2016).

2.1.4 Rasio Gini

Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistik Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 (*International NGO Forum on Indonesia Development, 2018*). Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna (RINI et al., 2022)

Menurut Badan Pusat Statistik, Rasio Gini di dasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Rasio Gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara. Rumus menghitung nilai Rasio Gini menurut BPS (2017) adalah sebagai berikut.

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{ci} + F_{ci-1})$$

Keterangan:

GR = Rasio Gini

f_{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{ci} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas
pengeluaran ke-i

F_{ci-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas
pengeluaran ke (i – 1)

Menurut Rini et al., (2022) , berikut adalah arti nilai dari besaran Rasio gini:

$G < 0,3$ (artinya ketimpangan rendah)

$0,3 \leq G \leq 0,5$ (artinya ketimpangan sedang)

$G > 0,5$ (artinya ketimpangan tinggi)

Walaupun dalam kenyataannya masih terdapat banyak pertimbangan untuk menyatakan pemerataan tingkat pendapatan masyarakat, rasio gini menjadi salah satu ukuran yang memenuhi empat kriteria, yaitu prinsip anonimitas (tidak memandang siapa yang dihitung apakah kaya atau miskin), prinsip independensi skala (tidak bergantung pada perekonomian suatu negara), prinsip independensi

populasi (tidak bergantung jumlah penduduk), serta prinsip transfer (mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan). Berdasarkan penjabaran tersebut, maka rasio gini valid untuk digunakan sebagai alat ukur ketimpangan yang umum digunakan (RINI et al., 2022).

2.1.5 Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Masruri (2016) penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja.

Menurut Adipuryanti & Sudibia, (2015) penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya permintaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja secara umum menunjukkan besarnya kemampuan suatu perusahaan menyerap sejumlah tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Kemampuan untuk menyerap tenaga kerja besarnya tidak sama antara sektor satu dengan sektor yang lain (Pramarta, 2021).

2.1.6 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007,

Pasal 1 memberikan definisi tentang penanaman modal dalam negeri yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Investor). Investor dalam negeri bisa perorangan warga negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Menurut Sari et al., (2020) PMDN adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah sebagai upaya pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik. Tujuan adanya PMDN yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagai modal awal untuk membuat sarana dan prasarana.

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal di dalam negeri yang dilakukan oleh investor dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu daerah yang dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan dengan aliran modal lainnya. Tidak meratanya realisasi penanaman modal dalam negeri menjadi salah satu faktor terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan (Sutrisna, 2018).

2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Indonesia, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh satuan maupun keseluruhan unit usaha yang terdapat pada wilayah atau daerah tersebut berupa barang maupun jasa. Sehingga dari situ dapat diketahui kondisi perekonomian di suatu daerah tersebut dalam periode tertentu dengan atas dasar harga konstan

maupun dengan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan dapat menunjukkan adanya nilai tambah suatu barang maupun jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dalam penghitungannya, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digambarkan bertambahnya suatu barang maupun jasa yang dihitung menggunakan dasar tahun berjalan. PDRB atas harga berlaku biasanya digunakan untuk kemampuan perekonomian di suatu daerah yang berupa pergeseran maupun struktur perekonomian di daerah tersebut (Astuti & Hukom, 2023).

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah angka PDRB per kapita. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Hartini, 2017). Sedangkan PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001) dalam (Hartini, 2015). Hal ini berarti juga bahwa semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain, jika pendapatan tinggi dan merata antar daerah maka ketimpangan pendapatan berkurang.

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut yang menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah (Hartini, 2017).

Menurut Badan Pusat Statistik (2008) angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran yang disajikan sebagai berikut:

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah provinsi dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit- unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu: Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa.

2. Menurut pendekatan pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor- faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan neto. Jumlah semua komponen pendapatan persektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor.

3. Menurut pendekatan pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung
- b. Konsumsi pemerintah
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto
- d. Perubahan stok
- e. Ekspor netto

2.1.8 Kemiskinan

2.1.8.1 Pengertian Kemiskinan

Menurut BPS kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Menurut Kuncoro (2006) berpendapat bahwa secara makro kemiskinan muncul karena ketidakseimbangan pola kepemilikan sumberdaya yang dapat memicu ketimpangan distribusi pendapatan. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan rendah kualitas sebaliknya dengan penduduk kaya yang memiliki sumber daya yang melimpah dan berkualitas.

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang (Syahri dan Gustiara, 2020). Kemiskinan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan antara kaya dan miskin semakin timpang. Seperti yang ungkapkan oleh (Arsyad, 2010) dalam (Hindun et al., 2019) tidak tercapainya pengurangan yang berarti pada angka kemiskinan mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan di Negara berkembang semakin meningkat. Oleh sebab itu, penurunan kemiskinan sangat diperlukan, agar ketimpangan pendapatan di masyarakat semakin rendah.

2.1.8.2 Jenis – jenis kemiskinan

Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia/Lakpesdam membagi kemiskinan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Kemiskinan absolut (pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya)
2. Kemiskinan relatif (situasi kemiskinan di atas garis kemiskinan berdasarkan pada jarak antara miskin dan non-miskin dalam suatu komunitas)
3. Kemiskinan struktural (kemiskinan ini terjadi saat orang atau kelompok masyarakat enggan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya sampai ada bantuan untuk mendorong mereka keluar dari kondisi tersebut).

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat asas hasil analisis yang dilakukan. Ringkasan penelitian terdahulu terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Analisis Pengaruh PDRB, IPM, dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kalimantan Tengah (Astuti & Hukom, 2023)	- PDRB - Tenaga Kerja	- IPM	PDRB mempunyai pengaruh yang negatif tidak signifikan. IPM dan Tenaga kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan.	Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 3, No 2, Juni Tahun 2023
2.	Pengaruh PDRB per Kapita, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011 – 2015 (Hartini, 2017)	- PDRB - Investasi	- Indeks Pembangunan Manusia	PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Investasi dan IPM mempunyai pengaruh negatif dan signifikan.	Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Maret Tahun 2017
3.	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh (Andiny, 2017)	- Kemiskinan	- Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan. Kemiskinan mempunyai pengaruh positif tidak signifikan.	Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), Vol. 1, No. 2, Desember Tahun 2017

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Hindun et al., 2019)	- Kemiskinan	- Pendidikan - Pengangguran	Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan Pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan	Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 8, No. 3, Agustus Tahun 2019
5.	Pengaruh Upah Minimum dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Sanjaya et al., 2016)	- Investasi	- Upah Minimum	Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan Investasi berpengaruh positif tidak signifikan	E - Jurnal EP Unud, Vol. 10, No. 12, Juni Tahun 2016
6.	Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan di DI Yogyakarta Tahun 2010-2019 (Pramarta, 2021)	- Penyerapan Tenaga Kerja	-	Penyerapan Tenaga Kerja berpengaruh negatif dan signifikan	Jurnal Penelitian Ekonomi Bisnis, Vol. 3, No. 2, April Tahun 2021
7.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatra Utara Periode 2015-2019 (Syahri & Gustiara, 2020)	- Kemiskinan	- Pertumbuhan Ekonomi	Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan	Journal of Trends Economics and Accounting Research, Vol. 1, No. 1, September Tahun 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera Tahun 2009-2020 (Ferry, 2023)	- PMDN - Tenaga Kerja	- PMA - Belanja Modal	PMA berpengaruh positif dan signifikan PMDN, tenaga kerja, dan belanja modal berpengaruh negatif tidak signifikan	Jurnal Ekonomi Bisnis UII, Vol. 2, No. 3, Desember Tahun 2023
9.	Pengaruh IPM dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali (Sutrisna, 2018)	- PMDN	- IPM	IPM berpengaruh negatif dan signifikan PMDN berpengaruh positif dan signifikan	E – Jurnal EP Unud, Vol. 10. No. 5, Juni Tahun 2018
10.	Pengaruh PMA, PMDN, PDRB, Penyerapan Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Disparitas Pendapatan di Pulau Jawa (Arinda & Lorentino, 2020)	- PMDN - PDRB - Penyerapan Tenaga Kerja	- PMA - Pengeluaran Pemerintah	PMA, PMDN, dan Pengeluaran pemerintah negatif tidak signifikan PDRB dan Penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan	Journal of Management & Business, Vol. 3, No. 2, November Tahun 2020
11.	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah di Kepulauan Jawa (Sari et al., 2020)	- PMDN	- Pertumbuhan Ekonomi - PMA - Upah Minimum Provinsi	Pertumbuhan ekonomi dan PMDN tidak berpengaruh negated signifikan PMA berpengaruh negatif signifikan UMP berpengaruh positif signifikan	Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, Vol. 5, No. 3, Mei Tahun 2020
12.	Analisis Pengaruh Pertumbuhan	- Investasi	- Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Development Policy and

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Mansyur et al., 2021)		- Pengeluaran Pemerintah	berpengaruh positif tidak signifikan Investasi berpengaruh negatif dan signifikan Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan	Management Review (DPMR), Vol. 1, No. 2, Desember Tahun 2021
13.	Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Gurusinga et al., 2022)	- Penyerapan Tenaga Kerja - Investasi	-	Penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan Investasi berpengaruh positif dan signifikan	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 22, No. 7, September Tahun 2022
14.	Pengaruh Upah dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kota di Provinsi Bali (Et & Sinica, 2019)	- Investasi	- Pengaruh upah	.Investasi berpengaruh positif dan signifikan Pengaruh upah berpengaruh negatif dan signifikan	E – Jurnal EP Unud, Vol. 11, No. 9, Oktober Tahun 2019
15.	Disparitas Pendapatan di Jawa Tengah (Pinilih, 2021)	- PMDN	- PMA - Pertumbuhan ekonomi	PMDN berpengaruh negatif dan signifikan PMA dan pertumbuhan ekonomi negatif dan tidak signifikan	E – Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Vol. 8, No. 1, Maret Tahun 2021

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan persepsi dan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti dengan teori-teori yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka. Mengacu pada teori yang ada maka garis besar penelitiannya ini yaitu melihat hubungan antara penyerapan tenaga kerja, PMDN, PDRB, dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan pada provinsi di pulau Jawa dan Bali tahun 2018-2022.

2.2.1 Hubungan Penyerapan Tenaga Kerja dengan Ketimpangan Pendapatan

Kesempatan bekerja bagi semua penduduk akan membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara ataupun suatu daerah dilihat dari tingkat pendapatan perkapita masyarakat itu sendiri, semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh masyarakat maka semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara. Apabila hal tersebut terjadi pada pendapatan masyarakat yang semakin meningkat dan merata maka dapat menekan ketimpangan pendapatan di suatu negara atau wilayah. Sementara itu tersedianya tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan dalam jumlah yang cukup dalam suatu wilayah merupakan sumber daya yang sangat berharga ketika dihadapkan pada permintaan tenaga kerja. Faktor ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan (Arinda, Lorentino, 2020).

Seseorang yang memperoleh pekerjaan itu didasarkan terhadap kemampuan dan dampaknya secara langsung pada perolehan pendapatan agar terpenuhi kebutuhannya. kesempatan kerja membuktikan pengaruh terhadap probabilitas

suatu wilayah untuk masuk dalam kategori terjadi ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, kesempatan kerja mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Kesempatan kerja dan ketimpangan pendapatan mempunyai kaitan seperti yang di kemukakan oleh Sukirno (2004) di mana efek pengangguran yaitu mengurangi pendapatan masyarakat yang akhirnya seseorang tidak akan mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat akan menurun karena menganggur ini menimbulkan ketimpangan pendapatan antara masyarakat berpenghasilan dengan masyarakat yang menganggur.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait hubungan pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan sebagai berikut. Dalam penelitiannya Astuti & Hukom (2023) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang berpengaruh positif dan signifikan antara penyerapan tenaga kerja dan ketimpangan pendapatan. Penelitian Pramarta (2021) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara penyerapan tenaga kerja dengan Ketimpangan pendapatan. Sementara pada penelitian Ferry (2023) mengungkapkan hubungan antara tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan terdapat pengaruh negatif dan signifikan

2.2.2 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Ketimpangan Pendapatan

Dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan *output* tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi.

Teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan tenaga kerja tetapi juga dapat memperbesar kapasitas produksi. Hal tersebut karena dengan adanya investasi maka ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja karena investasi yang banyak akan mampu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja, sehingga banyak masyarakat yang memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Harnita dkk., 2020).

Penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu daerah yang dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan dengan aliran modal lainnya. Tidak meratanya realisasi penanaman modal dalam negeri menjadi salah satu faktor terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan (Sutrisna, 2018).

PMDN menjadi indikator penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di setiap daerah. Maka dengan adanya PMDN akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Namun, yang menjadi masalah Ketika investasi terkonsentrasi pada beberapa daerah saja. Hal ini didasari oleh investor yang lebih memilih untuk menanamkan modalnya pada daerah yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sehingga akan menyebabkan perbedaan pendapatan yang diperoleh masyarakat dan akan menaikkan ketimpangan pendapatan masyarakat.

Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait hubungan pengaruh PMDN terhadap ketimpangan pendapatan sebagai berikut. Dalam penelitiannya Ferry

(2023) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang berpengaruh negatif tidak signifikan antara PMDN dan ketimpangan pendapatan. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya dalam penelitian Sutrisna (2018) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara PMDN dengan Ketimpangan pendapatan. Sementara dalam penelitian (Pinilih, 2021) mengungkapkan bahwa PMDN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2.3 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Ketimpangan Pendapatan

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Salah satu manfaat dari PDRB adalah untuk mengetahui tingkat produk neto atau nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh faktor industri, laju pertumbuhan ekonomi dan pola struktur perekonomian pada satu periode tertentu pada suatu negara dan/atau daerah yang biasanya pada satu tahun.

Peningkatan nilai PDRB pada sektor-sektor ekonomi yang ada akan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang akan tersedia. Dengan adanya pengembangan dan peningkatan sektor-sektor ekonomi akan mendorong terbukanya lapangan kerja yang baru melalui pendapatan perkapita itu sendiri, sehingga PDRB memiliki hubungan yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja (Arinda, Lorentino, 2020).

Bersdasarkan beberapa penelitian terdahulu terkait hubungan pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan terdapat beberapa perbedaan. Dalam

penelitiannya Astuti & Hukom (2023) terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dalam penelitian Hartini (2017) mengungkapkan bahwa perbedaan pendapatan suatu sektor ekonomi dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan sehingga dalam penelitiannya PDRB berpengaruh positif dan signifikan. Sementara dalam penelitiannya Arinda & Lorentino (2020) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang berpengaruh negatif dan signifikan antara PDRB dan ketimpangan pendapatan

2.2.4 Hubungan Kemiskinan dengan Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan relatif (Badrudin, 2017). Kemiskinan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan antara kaya dan miskin semakin timpang. Seperti yang diungkapkan Hindun et al., (2019) tidak tercapainya pengurangan yang berarti pada angka kemiskinan mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan di negara berkembang semakin meningkat. Oleh sebab itu, penurunan kemiskinan sangat diperlukan, agar ketimpangan pendapatan di masyarakat semakin rendah.

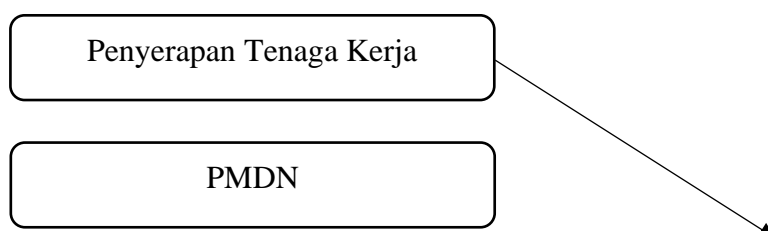
Menurut teori Nurkse kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan, adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan Sumber daya manusia menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas akan mengakibatkan pendapatan yang diterima rendah, pendapatan yang rendah mengakibatkan investasi dan tabungan menurun. (Farhan & Sugianto, 2022).

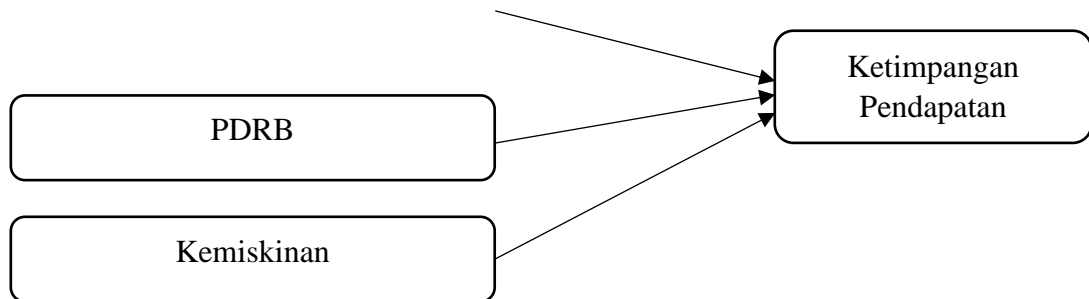
Adapun beberapa penelitian terkait hubungan pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan sebagai berikut. Dalam penelitiannya Anam

(2015) menyatakan bahwa dalam jangka panjang terdapat hubungan positif antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Syawie (2017) mengungkapkan bahwa pada proporsi tertentu, kemiskinan memang berkaitan dengan kesenjangan. Akan tetapi, kemiskinan yang berkurang bukan berarti akan mengurangi ketimpangan. Dalam penelitian Syahri & Gustiara (2020) mengungkapkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara dalam penelitian Andiny (2017) kemiskinan memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa penafsiran terkait hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Temuan tersebut ada yang berhubungan positif, dan juga berhubungan negatif. Pada penelitian ini diharapkan, tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut bahwa penyerapan tenaga kerja, PMDN, PDRB serta kemiskinan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Secara jelasnya mengenai kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat dari Gambar dibawah.





Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah dibahas sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial penyerapan tenaga kerja, PMDN, PDRB dan berpengaruh negatif sedangkan kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di pulau Jawa dan Bali Tahun 2018-2022.
2. Diduga secara bersama- sama penyerapan tenaga kerja, PMDN, PDRB dan Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di pulau Jawa dan Bali Tahun 2018-2022.